



EDU MANAGE Vol. 1 No. 1. Juni 2022

EDU MANAGE

(Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)

Email: jurnalstaini@gmail.com

<https://www.jurnal.staini.ac.id/index.php/edumanager>

Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Ridho Safrial¹, Arifani Maulida Rahman² Farid Setiawan³

¹²³ Affiliation : Universitas Ahmad Dahlan

e-mail: ¹ridho2000031121@webmail.uad.ac.id, ²arifani2000031264@webmail.uad.ac.id,
³farid.setiawan@pai.uad.ac.id

WhatsApp Number*

ABSTRAK

Artikel yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pendidikan” ini berfokus pada kajian perumusan kebijakan pendidikan. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan pada data penelitian ini menggunakan prosedur tinjauan pustaka, jurnal, data dari buku dan internet yang digunakan untuk mendukung hipotesis atau topik terkait tentang penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah evaluasi memiliki aktivitas yang dijalankan pada pelaksanaan sebuah kebijakan supaya dapat mengetahui apakah kebijakan itu terselenggara secara baik atau tidak, mengetahui kekurangan serta keunggulan kebijakan tersebut dan mengetahui seberapa jauh kebijakan itu dilaksanakan. Maka dari itu evaluasi dilakukan untuk menyempurnakan kebijakan pendidikan.

Kata Kunci: *evaluasi, pendidikan, kebijakan*

ABSTRACT

The article entitled "Evaluation of Education Policy" focuses on the study of education policy formulation. This researcher uses a qualitative method, by collecting data for this research using literature review procedures, journals, data from books and the internet which are used to support hypotheses or topics related to research. Based on the results of this study, evaluation has activities carried out in the implementation of a policy so that you can find out whether the policy is implemented properly or not, find out the advantages and disadvantages of the policy and find out how far the policy has been implemented. Therefore evaluation is carried out to improve education policy.

Keywords: *evaluation, education, policy*

PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan di Indonesia sesungguhnya menempati posisi yang sentral bagi usaha untuk memajukan bangsa Indonesia. Apabila pemerintah Indonesia gagal dalam membuat kebijakan yang unggul dalam bidang pendidikan, maka taruhannya adalah kerusakan pada kehidupan bangsa Indonesia. Kebijakan

pendidikan yang buruk akan berdampak panjang, negara Indonesia hanya yang unggul jika kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan-kebijakan yang unggul dan tentu saja dapat diimplementasikan.

Kebijakan pendidikan merupakan salah satu kebijakan negara disamping kebijakan-kebijakan lainnya seperti, kebijakan ekonomi, politik, pertahanan, agama terutama pendidikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan sub sistem dari kebijakan negara atau pemerintah secara keseluruhan (shabir, 2013).

Persoalan utama yang perlu dihadapi adalah apakah kebijakan pendidikan bagian dari kebijakan publik atau kebijakan pendidikan publik. Permasalahan ini menjadi penting karena terkait dengan memosisikan pendidikan dalam kontens sektor-sektor publik yang harus dikelola secara serius dan besar tingkat urgensi bagi pemerintah di dalam menetapkan prioritas program-program pembangunan pendidikan (Bakry, 2010).

Pembaharuan dalam bidang pendidikan harus memahami sebagai upaya manusia untuk membebaskan dirinya dari segala keterbelakangan dan tidak-tahuan yang dimilikinya. Selain itu, kebijakan pendidikan merupakan cara manusia untuk mengenal dirinya dalam konteks kemanusiaan, serta sebagai upaya mendekatkan diri kepada penciptanya (Allah) melalui perspektif kemanusiaan yang dimilikinya. Pendidikan harus mampu merangsang manusia untuk mempergunakan potensi tersebut sesuai dengan tata nilai kemanusiaan, secara material pendidikan harusnya dapat memberikan pengetahuan yang memajukan dan mempertinggi kualitas hidup, baik dalam skala kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara.

Bagi masyarakat Indonesia, masalah dalam dunia pendidikan dengan sendirinya menjadi salah satu agenda yang menduduki posisi terpenting. Kesadaran hal ini yang menjadikan pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan baginwarga negaranya. Namun dalam hal ini jika dicermati dengan lebih dalam lagi, kesenjangan antara tingginya animo masyarakat untuk mendapatkan pendidikan sebanyak-banyaknya dengan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan. Menyadari keterbatasan yang dimiliki masyarakat Indonesia menjadi pemerintah membuka peluang yang besar kepada setiap individu serta sekelompok masyarakat agar ukit berpartisipasi dalam memecahkan kesenjangan pendidikan di Indonesia melalui kegiatan evaluasi kebijakan

pendidikan.

Agar pelaksanaan pendidikan berjalan dengan baik dari pelaksanaan sebelumnya maka perlu dilakukan evaluasi kebijakan pendidikan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pendidikan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan pendidikan dilakukan agar pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan serta dapat memberikan pengaruh nyata terhadap penerima program (Arwildanyanto, Sukin, dan Sumar, 2018). Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan salah satu tindakan untuk mengetahui suatu kebijakan pendidikan untuk dapat memberikan dampak nyata terhadap khayalak sesuai yang diinginkan. Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan upaya untuk mengetahui berapa biaya dan manfaat suatu kebijakan dengan mencermati beberapa aspek yang telah ditetapkan.

Pentingnya peran evaluasi dalam pendidikan, mengakibatkan seorang guru harus mampu mempersiapkan diri dengan kompetensi yang baik, baik dari segi rancangan suatu pembelajaran, dan seorang guru dapat mengembangkan proses pembelajaran serta penguasaannya terhadap bahan ajar, dan juga tidak cukup dengan kemampuan guru dalam penguasaan didalam kelasn, tanpa diimbangi dengan kemampuan melakukan evaluasi terhadap perencanaan terhadap kompetensi siswa yang sangat menentukan dalam konteks perencanaan berikutnya, atau kebijakan perlakuan terhadap siswa terkait dengan konsep belajar tuntas (Purwanto, 2009:3).

Evaluasi dalam pendidikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau proses untuk menentukan suatu nilai yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan islam Evaluasi dapat diberi batasan sebagai suatu kegiatan untuk penentu majunya suatu pekerjaan dalam proses pendidikan islam (2002:77) dalam ruang lingkup terbatas, evaluasi dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat keberhasilan pendidik dalam menyampaikan materi pendidikan islam pada peserta didik.

Menurut UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 27 ayat 1 yakni: evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara Pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya peserta didik ,Lembaga dan program Pendidikan.

Evaluasi pendidikan sangat bermanfaat baik bagi siswa/peserta

pendidikan, pengajar maupun manajemen. Dengan adanya suatu evaluasi dalam pendidikan, peserta didik dapat mengetahui tolak ukur keberhasilan yang telah dicapai selama proses belajar di sekolah. Pada kondisi dimana siswa mendapatkan nilai yang memuaskan maka akan memberikan dampak berupa suatu stimulus, motivator agar siswa dapat lebih meningkatkan prestasinya. Pada kondisi dimana hasil yang dicapai tidak memuaskan maka siswa akan berusaha memperbaiki kegiatan dalam belajar, namun demikian sangat diperlukan pemberian stimulus positif dan motivasi sebagai penyemangat dari guru atau pengajar agar siswa tidak putus asa. Dari sisi pendidik, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik untuk menetapkan upaya upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif yang mendeskripsikan tentang keadaan sebenarnya yang sesuai dengan penelitian tersebut. Pada dasarnya di bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora, menurut Bogdan, Robert, dan Steven J. Taylor. Terutama khususnya dalam kaitannya dengan pola dan tingkah laku manusia (behavior), serta faktor-faktor yang sulit di ukur dengan angka-angka. Karena apa yang terjadi tidak selalu sama dengan apa yang dipikirkan seseorang dan keinginan yang nyata. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersumber pada pengamatan yang obyektif, partisipatif terhadap suatu fenomena sosial dan dilakukan dengan sikap induktif.

Pengumpulan pada data penelitian ini menggunakan prosedur tinjauan pustaka, jurnal, data dari buku dan internet yang digunakan untuk mendukung hipotesis atau topik terkait tentang penelitian. Hal ini dimaksud untuk memaksimalkan pada kualitas penilaian yang didapatkan. Literatur di pelajari terbatas pada tulisan dalam Bahasa. Studi dari buku, ulasan, atau makalah diskusi dan dianalisa.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

TEMUAN

Pengumpulan pada data penelitian ini menggunakan prosedur tinjauan pustaka, jurnal, data dari buku dan internet yang digunakan untuk mendukung hipotesis atau topik terkait tentang penelitian. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan data yang berkaitan tentang Evaluasi Kebijakan Pendidikan.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan suatu aktivitas untuk dapat mengetahui suatu kebijakan pendidikan tersebut sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan serta dapat memberikan dampak nyata terhadap khalayak sesuai dengan yang diinginkan. Proses evaluasi ini dilakukan di dalam penerapan analisis kebijakan pendidikan, agar diketahui apakah kebijakan pendidikan tersebut dapat terlaksana dengan baik atau tidak. Evaluasi kebijakan pendidikan dapat diketahui kekurangan dan kelebihan atas kebijakan pendidikan tersebut diimplementasikan.

Kegiatan evaluasi merupakan tahap akhir dari sebuah proses pembuatan kebijakan yang dapat menghasilkan masukan untuk dapat menyempurnakan kebijakan pendidikan tersebut. Pada umumnya evaluasi kebijakan pendidikan merupakan proses atau kegiatan dilakukan secara berurutan, dan menjadi tahapan akhir dalam proses analisis kebijakan pendidikan. (Islamy,19994; Winarno,2008). Namun ada sebagian para ahli mengatakan evaluasi kebijakan pendidikan bukan merupakan tahapan akhir dari proses kebijakan, bisa dilakukan ditengah proses analisis, dengan proses kebijakan itu mengarah pada kegagalan atau kurang sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Dalam melakukan evaluasi kebijakan pendidikan perlu dilakukan dengan mengajukan berbagai alasan yang rasional sebagai berikut, 1) apakah hal-hal yang telah dirumuskan dalam formulasi kebijakan pendidikan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak, 2) apakah rumusan kebijakan pendidikan telah dilaksanakan sudah berhasil atau tidak, 3) apakah kelebihan dan kekurangan rumusan kebijakan pendidikan dalam kaitanya dengan faktor kondisional dan situasional dimana kebijaksanaan tersebut dilaksanakan 4) seberapa jauh suatu rumusan kebijakan pendidikan itu telah dapat diimplementasikan, 5) apakah keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kebijakan pendidikan tersebut, 6) seberapa dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pendidikan terhadap masyarakat (publik), 7) apakah resiko-resiko yang telah diperhitungkan pada saat formulasi kebijakan pendidikan telah dapat diatasi dengan baik atau tidak, 8) bagaimana langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam hal perbaikan kebijakan pendidikan berikutnya.

Untuk mendapatkan jawaban yang rasional dari alasan, atas permasalahan yang menarik analisis untuk melakukan evaluasi kebijakan pendidikan, maka diperlukan koordinasi dan komunikasi yang intensif antar aktor yang melakukan

evaluasi kebijakan pendidikan, antara lain 1) aktor formal, terdiri dari pembuat kebijakan (legislatif), pelaksana kebijakan (eksekutif), administrator dari tingkat nasional sampai dengan tingkat lokal sebagai pelaksana pendidikan, 2) Aktor non formal, diantaranya pengurus dan anggota partai politik, organisasi masa, interest group, kelompok perantara, mitra pelaksana kebijakan, tokoh perorangan dan media massa dan lembaga yang berafisiliasi dengan penyelenggaraan pendidikan, misalnya di Indonesia ada Muhammadiyah, NU, atau yayasan pendidikan yang memiliki unit usaha dalam penyelenggaraan pendidikan.

B. Fungsi dan Tujuan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Fungsi evaluasi kebijakan pendidikan dalam lingkup luas merupakan bahan masukan untuk suatu kebijakan yang baru agar menghasilkan sebuah kebijakan pendidikan yang lebih baik lagi (Wirawan, 2011:23). Adapun uraian tentang tujuan evaluasi kebijakan pendidikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pengaruh program terhadap masyarakat misal pendidikan gratis, hal ini harus diketahui untuk menyelesaikan masalah situasi, keadaan yang dihadapi masyarakat.
2. Apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
3. Apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4. Mengidentifikasi dan menemukan dimensi program apakah sudah belajar atau belum.
5. Pengembangan staf pelaksana program kependidikan.
6. Memenuhi Undang-undang dan produk.

Evaluasi kebijakan dapat digunakan untuk melihat faktor-faktor kegagalan suatu kebijakan, atau untuk mengetahui kebijakan pendidikan yang dijalankan sesuai tujuan yang di inginkan. Atas dasar itulah, evaluasi kebijakan pendidikan bisa arahkan pada tiga komponen ;

1. Administratif, yaitu mengukur prosedur kebijakan pendidikan secara administratif, biasanya lebih berfokus pada aspek finansial;
2. Yudisial, yaitu mengukur objek-objek hukum, yang bisa di langgar atau tidak di langgar

3. Politik, yaitu mengukur pertimbangan politik dari suatu kebijakan itu (Putra; 2012)

Adapun Tujuan Evaluasi Kebijakan Pendidikan dapat dilihat

Menurut Subarsono (2010: menyebutkan bahwa evaluasi kebijakan memiliki tujuan :

- a. Untuk menentukan tingkat kinerja sebuah kebijakan, maka dari itu dapat diketahui tingkat pencapaian tujuan dan target suatu kebijakan;
- b. Mengukur tingkat keefisienan dalam suatu kebijakan.

C. Manfaat Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Manfaat evaluasi kebijakan Pendidikan, dapat di klasifikasikan menjadi dua aspek yaitu internal dan eksternal. Dimensi internal yang berkenaan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam persiapan atau implementasi kebijakan, manfaat yang didapatkan diantaranya yaitu:

1. Dapat mengetahui keberhasilan suatu kebijakan yang dilakukan, agar dapat diperoleh sebuah kebijakan dengan penilaian yang sudah mencapai tujuan atau belum.
2. Dapat mengetahui efektivitas kebijakan dengan penilaian apakah suatu kebijakan dapat mencapai kesuksesan atau tidak.
3. Dapat menghindari pengulangan kesalahan pada informasi terkait evaluasi kebijakan yang memadai dapat memberikan tanda-tanda supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama atau kebijakan yang lain dalam waktu yang akan datang.(Lukitasari et al., 2017)

Dimensi yang bersifat eksternal berhubungan dengan para pihak yang tidak terlibat langsung dalam persiapan ataupun implementasi kebijakan. Akan tetapi, mereka dapat menikmati manfaat evaluasi kebijakan Pendidikan diantaranya:

1. Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas publik, merupakan penilaian terhadap kinerja kebijakan yang sudah ditentukan salah satunya dalam bentuk pertanggungjawaban pengambilan kebijakan kepada publik, baik itu terkait dengan langsung maupun tidak.
2. Untuk dapat mensosialisasikan manfaat dalam suatu kebijakan, terutama pada kelompok sasaran dan penerima secara terukur.(Jaysurrohman et al., 2021)

D. Monitoring Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Monitoring ialah upaya pengumpulan informasi yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada pengelola program dan pemangku kepentingan tentang indikasi awal kemajuan dan kekurangan pelaksanaan program dalam rangka perbaikan untuk mencapai suatu tujuan program. Monitoring merupakan suatu kegiatan untuk dapat mengetahui apakah program tersebut yang dibuat dapat berjalan dengan kondusif atau tidak yang sebagaimana mestinya dengan apa yang direncanakan, adakah hambatan yang terjadi dan bagaimana para pelaksana kebijakan itu mengatasi hambatan tersebut. Monitoring terhadap sebuah hasil perencanaan yang sedang berlangsung menjadikan alat dalam pengendalian yang baik dalam seluruh proses implementasi (Mochammad Syamsuddin et al., 2015).

Pada pengawasan evaluasi kebijakan Pendidikan memiliki hubungan yang faktual pada kebijakan, yaitu dengan bergerak mundur seperti apa yang dilihat saat ini supaya menggambarkan sesuatu yang sudah tercipta sebelumnya. Upaya untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Indonesia membutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah, hal ini berarti muncul pada kebijakan yang harus dilandaskan pada orientasi dengan tujuan yang kuat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam bidang Pendidikan tidak hanya terbentuk undang-undang saja. Kebijakan Pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan Langkah-langkah strategis Pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi Pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya suatu tujuan Pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu (Nasihi & Hapsari, 2022).

Untuk itu, monitoring perlu dilakukan dengan baik, agar dapat memastikan pelaksanaan Pendidikan berada pada jalur yang sesuai dengan pedoman dan perencanaan program dan dapat memberikan informasi kepada pengelola program, dan apabila terjadi hambatan dan penyimpangan serta berbagai masukan dalam melakukan evaluasi. Secara prinsip monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna untuk memastikan kesesuaian proses dan pencapaian yang sesuai direncanakan atau tidak.

PENUTUP

Evaluasi adalah proses tahap akhir dari suatu proses kebijakan yang dapat menghasilkan masukan untuk dapat menyempurnakan kebijakan pendidikan tersebut. Dan evaluasi kebijakan Pendidikan pada hakikatnya adalah alat guna untuk

menghimpun dan mengelola informasi tentang program atau pelayanan yang diterapkan.

Evaluasi memiliki aktivitas yang dijalankan pada pelaksanaan sebuah kebijakan supaya dapat mengetahui apakah kebijakan itu terselenggara secara baik atau tidak, mengetahui kekurangan serta keunggulan kebijakan tersebut dan mengetahui seberapa jauh kebijakan itu dilaksanakan. Evaluasi adalah suatu proses akhir dari suatu proses penyusunan kebijakan, yang dapat memberikan saran-ran guna untuk memperbaiki kebijakan atau perumusan kebijakan selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Idrus, M. (2014). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam. *El-Tarbawi*, 7(1), 69–75. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol7.iss1.art7>
- Jamilus, J., & Muntatsiroh, A. (2023). Pentingnya Evaluasi Pendidikan Islam dalam Sebuah Lembaga Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 1–13. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11472>
- Jaysurrohman, R. A., Supandi, M., Wardani, M. T., Puthaen, M., & Setiawan, F. (2021). Problematika dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *BINTANG: Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 3(2), 215–227. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang/article/view/1292>
- Kebijakan Pendidikan Jarak Jauh Pada Program TTM Studi di Kecamatan Mangoli Utara Mohbir Umasugi, E. (2021). 2021: Hlm. *Jpalg*, 5(2), 156–166. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v5i2.4808>
- Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 121. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p121-134>
- Mochammad Syamsuddin, Kuswara, Harris Iskandar, & Ade Kusmiadi. (2015). *Sejarah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat*. 1–226.
- Muhammad, El Widdah, M., & Setiawan, H. (2023). Aplikasi dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan Islam. *Attractive : Innovative Education Journal*, 5(1), 164–171. <https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>
- Nasihi, A., & Hapsari, T. A. R. (2022). Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *Indonesian Journal of Teaching and Learning (INTEL)*, 1(1), 77–88. <https://journals.eduped.org/index.php/intel/article/view/112>
- Nursapiah. Penelitian Kualitatif. Wal ashri Publishing, 2020.
- Prasetya, B. (2019). Mengungkap Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan. *Conciencia*, 19(2), 99–111. <https://doi.org/10.19109/conciencia.v19i2.4395>
- Sawaluddin. (2018). Konsep Evaluasi dalam Pembelajaran Pendidikan Islam 1775- Article Text-4102-3-10-20180713. *Al- Thariqah*, 3(1), 39–52.
- Arwildayanto, Arifin Sukung, and Warni Tune Sumar. "Analisis kebijakan

pendidikan kajian teoritis, eksploratif, dan aplikatif." *Education policy analysis: Theoretical, exploratory, and application*]. Bandung, Indonesia: Cendekia Press (2018).

Bab, V. "Evaluasi Kebijakan Pendidikan." *ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN* (2018): 93.